

**SENGKETA POLITIK-PARADIPLOMASI ANTARA
PEMERINTAHAN ACEH DAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN
LEMBAGA WALI NANGGROE**



DISERTASI
Diajukan oleh:

TAKDIR ALI MUKTI

NIM 20152020015

**Diajukan kepada Program Doktor
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Doktor Politik Islam**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Takdir Ali Mukti
Nomor Mahasiswa : 20152020015
Jenjang : Doktor (S.3)
Institusi : Pascasarjana Program Doktor
Politik Islam-Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah disertasi yang berjudul:
**'SENGKETA POLITIK-PARADIPLOMASI ANTARA
PEMERINTAHAN ACEH DAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN
LEMBAGA WALI NANGGROE'**

merupakan karya ASLI dari penulis disertasi ini, dengan mematuhi kaidah-kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar atau pun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 3 Agustus 2019



Takdir Ali Mukti

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	ii
Halaman Pengesahan	iii
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
Daftar Figure	ix
Daftar Tabel	x
Bab 1 : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Jangkauan (<i>Scope</i>) dan Tujuan Penelitian	11
1.4 Kontribusi Penelitian	12
1.5 Originalitas Penelitian	14
1.6 Ringkasan Laporan Penelitian Disertasi (<i>Overview</i>)	22
1.7 Publikasi Internasional Hasil Penelitian	24
BAB 2 : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK	
2.1 Kajian Pustaka	25
2.2 Kerangka Teoritik	51
2.2.1 Teori Preferensi Politik dari Epstein	53
2.2.2 Konsep International Norm (Paradiplomacy) dari A. Went	59
2.3 Hipotesis	68
BAB 3 : METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	70
3.2 Strategi Penelitian	75
3.3 Tehnik Pengumpulan Data	75
3.4 Informan Penelitian	77

3.5	Teknik Analisis Data	78
3.6	Uji Validitas Data	79

BAB 4 : DINAMIKA PARADIPLOMASI DALAM KERANGKA POLITIK ACEH

4.1.	Isu-Isu Pokok dalam MOU Helsinki dan Sumber Kewenangan Paradiplomasi Pemerintahan Aceh	80
4.2	Isu-Isu Krusial dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe	89
4.2.1	Perubahan Politik-Paradiplomasi Aceh	90
4.2.2	Politik Paradiplomasi Pemerintah RI	92
4.3	Identifikasi Jejak Ideologi GAM dalam Pemerintahan Aceh dan Kebiasaan (Custom) Praktik Paradiplomasi Bangsa Aceh	100
4.3.1	Jejak Ideologi GAM dalam Pemerintahan Aceh	100
4.3.1.1	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) didominasi Aktifis GAM	101
4.3.1.2	Aktifis GAM Masuk dalam Birokrasi Pemerintahan Aceh	104
4.3.1.3	Sikap Kelompok Kepentingan: Ulama, LSM Lokal dan Intelektual muda Aceh Mendukung GAM dan Wali	106
4.3.1.4	Media Massa Aceh Menyuarakan Aspirasi GAM	109
4.3.1.5	GAM Struktural Masih Utuh dalam KPA dan Cita-Cita Pendukung GAM Tetap Aceh Merdeka	110
4.3.1.6	Kegigihan Mempertahankan Bendera Aceh	112
4.3.2	Kebiasaan (custom) Praktik Paradiplomasi Bangsa Aceh	114
4.3.2.1	Diplomasi sebagai Kebiasaan Internasional Bangsa Aceh Sejak Abad 16	115
4.3.2.2	Para Pemimpin GAM adalah Para Pelaku Diplomatik (Diplomat)	118
4.3.2.3	Eksistensi GAM di Luar Negeri Pasca MOU Helsinki	122
4.3.2.4	Dukungan INGO dan IGO bagi Perjuangan GAM	125

4.4	Dinamika Konflik Politik Paradiplomasi Aceh dengan Pusat	126
4.4.1	Poin-Poin MOU Helsinki yang Dilanggar oleh Pemerintah RI	129
4.4.2	Perubahan Poin MoU dalam UUPA Tahun 2006 dan Peraturan-Peraturan Lainnya	131
4.5	Aktor-Aktor Otoritatif Dalam Memutuskan Politik Paradiplomasi Aceh	133
BAB 5 : ALASAN PEMERINTAHAN ACEH MEMPERTAHAN-		
	KAN POLITIK PARADIPLOMASI ACEH	135
5.1	Keberlanjutan Ideologi GAM dan Preferensi Politik dalam Pemerintahan Aceh	136
5.1.1	Tahap-Tahap Masuknya Ideologi GAM dalam Pemerintahan Aceh	137
5.1.2	Terlembaganya Ideologi Perjuangan Tiroisme	166
5.1.2.1	Tangis Soekarno, Misiu Soeharto dan Tiroisme	167
5.1.2.2	Fondasi dan Nilai-Nilai Dasar (Core Values) Tiroisme/ Ideologi GAM	178
5.1.3	Ideologi GAM sebagai Preferensi Politik Pemerintahan Aceh dalam Menetapkan dan Mempertahankan Keputusan Tentang Lembaga Wali Nanggroe	189
5.2	Norma Paradiplomasi dalam Rasionalitas Politik Pengambilan Keputusan Tentang LWN	203
5.2.1	Paradiplomasi dan Identitas Bangsa Aceh	205
5.2.2	Paradiplomasi sebagai Instrument Perjuangan Bangsa Aceh	215
5.3	Cara Pemerintahan Aceh Mempertahankan Politik-Paradiplomasi	219
5.3.1	Kesatuan Sikap Politik Gubernur dan DPR Aceh dalam Isu tentang Lembaga Wali Nanggroe	221

5.3.2	Mempertahankan Penafsiran GAM atas MOU Helsinki	223
5.4	Kebaruan Penelitian (Novelty)	224
BAB 6 : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		
6.1	Kesimpulan	228
6.2	Rekomendasi	231
DAFTAR PUSTAKA		233-244
LAMPIRAN PUBLIKASI INTERNASIONAL		

DAFTAR FIGURE

Figure	Keterangan	Hal.
2.1	Alur Kerja Preferensi politik Ideologi dalam mempengaruhi perilaku/Keputusan politik	57
2.2	Skema Wendt tentang 'Norma' yang Mempengaruhi Perilaku/Keputusan Agent	63
2.3	Skema Identitas dan Kultur Pembentuk 'National Interest' dan state/substate actions dari Wendt	66
2.4	Aplikasi Model Teoritik Kombinasi antara teori preferensi politik dan Konsep International (Paradiplomatic) Norm dari Wendt dalam Studi Kasus Konflik Politik-Paradiplomasi Pemerintahan Aceh	68
3.1	Bagan Alur Penelitian Kualitative	71
3.2	Design Penelitian Kualitative	74
5.1	Bendera dan Lambang Aceh Merdeka	188
5.2	Pola Preferensi Ideologi GAM/Tiroisme dalam mempengaruhi rasionalitas elit Pemerintahan Aceh dalam Menetapkan dan mempertahankan Qanun tentang Lembaga Wali Nanggroe	190
5.3	Skema Hubungan antara norma paradiplomasi dan pembentukan kepentingan 'nasional' (Pemerintahan) Bangsa Aceh	206
5.4	Tuntutan Maksimal Penerapan MOU dalam Pemerintahan Aceh	214
5.5	Garis Komando Pemerintahan Aceh menurut Qanun No. 9 Tahun 2013	219
6.1	Skema Pengembangan Teoritik Penelitian	229

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal.
1.1	Perbandingan Prinsip-Prinsip Politik-Paradiplomasi Pemerintah RI dengan Pemerintahan Aceh	9
1.2	Peta Penelitian tentang Sengketa antara Pemerintah RI dengan Pemerintahan Aceh Pasca Perjanjian Damai (MOU)	21
2.1	Ringkasan Kajian Pustaka	42
4.1	Isu-Isu Krusial dalam Perundingan Damai Helsinki 2005	82
4.2	Perbandingan Prinsip-Prinsip Politik-Paradiplomasi Pemerintah RI dengan Pemerintahan Aceh	95
5.1	Perubahan Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe Dalam Raqan Tahun 2009, dan Qanun Nomor 9 Tahun 2013	199
5.2	Nilai-Nilai Dasar Ideologi GAM dan Rasionalitas Politik Para Pemimpin Pemerintahan Aceh dan perubahan Keputusan Tahun 2009 dan 2013	202
5.3	Perkembangan regulasi paradiplomasi Pemerintahan Aceh	220
5.4	Rasionalitas Politik Khas Para Pemimpin Pemerintahan Aceh Dengan Preferensi Ideologi Politik GAM/Tiroisme	225
6.1	Perbandingan Rasionalitas Politik Secara Umum dengan Rasionalitas Politik Khas Pemerintahan Aceh	230